

EFEKTIVITAS METODE KAMPANYE DEBAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018

Junior A. K. Rawis¹
Ferry D. Liando²
Fanley N. Pangemanan³

Abstrak

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Debat merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Di ajang inilah, setiap paslon mempromosikan visi-misinya. Selain sebagai sarana untuk menguji seberapa jauh pasangan calon menguasai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang akan dipimpinnya, juga bisa dijadikan pasangan calon sebagai wahana untuk meyakinkan publik dan menaikkan tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini fokus pada efektivitas metode kampanye debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas Bernard dalam Prawirosentono. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Mengapa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektif ?. Hasil analisis menunjukkan bahwa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektif yang disebabkan oleh faktor penentuan tempat yang tidak strategis, pembatasan kuota pendukung dan juga media penyiaran yang tidak memadai.

Kata Kunci : Efektivitas, Metode Kampanye Debat, Pemilihan Umum Kepala Daerah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa tahapan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat 7 (tujuh) metode kampanye yang diperbolehkan regulasi Pilkada. Salah satu diantaranya adalah Debat Publik / Debat terbuka antar pasangan calon. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa menyelenggarakan tahapan debat sebanyak 3 (tiga) putaran. Debat putaran pertama mengangkat Tema “Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”, tema debat putaran kedua adalah “Sinergitas Perencanaan Pembangunan Minahasa dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Upaya Memperkokoh NKRI”, dan tema debat putaran ketiga adalah “Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Tata Kelola

Pemerintahan, Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi”.

Debat merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Di ajang inilah, setiap paslon mempromosikan visi-misinya. Selain sebagai sarana untuk menguji seberapa jauh pasangan calon menguasai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang akan dipimpinnya, juga bisa dijadikan pasangan calon sebagai wahana untuk meyakinkan publik dan menaikkan tingkat kepercayaan publik. Ketetapan argumen, ketangkasan menjawab soal dari pasangan calon lain, keakuratan data, konsistensi dalil, dan rasionalitas jawaban, semua dipergakan di forum debat dan publik yang akan menilai. Debat tidak semata pada tahapan prosedural tetapi mengandung makna substantif yakni komunikasi politik. Publik mendapatkan pesan dan pesan itu direspon dengan sebuah sikap politik.

Proses tahapan debat selama 3 (tiga) putaran ini disiarkan langsung oleh stasiun televisi Republik Indonesia (tvri) dan disaksikan secara langsung oleh masing-masing pendukung pasangan calon yang hadir di tempat pelaksanaan debat tetapi tidak semua masyarakat Kabupaten Minahasa menyaksikan proses tahapan Debat ini baik secara langsung maupun lewat penyiaran media elektronik. Hampir sebagian besar masyarakat Minahasa tidak mengikuti atau menyaksikan proses tahapan debat ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya akses yang cukup jauh, kuota pendukung dari masing-masing pasangan calon terbatas pada tempat dilaksanakannya tahapan debat dan akses media elektronik yang kurang dilihat oleh masyarakat Minahasa. Debat seharusnya menjadi ajang adu argumentasi dan gagasan dari

masing-masing pasangan calon dan disaksikan atau di lihat oleh semua masyarakat Minahasa dengan tujuan agar pesan-pesan politik bahkan argumentasi yang disampaikan kedua pasangan calon tidak sampai kepada masyarakat sebagai pemilih secara langsung.

Tinjauan Pustaka

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektif-an” (*efectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Anggraini, Yusliati 2018:13).

Bernard dalam Prawirosentono (2008:27) mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

Dimensi Efektivitas program diuraikan menjadi indicator :

1. Kejelasan tujuan program
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program
3. Perumusan kebijakan program yang mantap
4. Penyusunan program yang tepat
5. Penyediaan sarana dan prasarana
6. Efektivitas operasional program
7. Efektivitas fungsional program

8. Efektivitas tujuan program
 9. Efektivitas sasaran program
 10. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program
 11. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program
- Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (Cangara, 2011:223). Sementara pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto (dalam Cangara, 2011:229) adalah sebagai berikut: “*campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior.* (kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menrima memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu)”

Debat adalah perbahasan, pertentangan idea, pendapat, dan buah pikiran. Perdebatan melibatkan pertelingkahan hujah antara orang yang menyokong dengan orang yang menentang isu yang dipolimikan. Hakikatnya, debat adalah wacana kritikal bagi memperhalus isu. (Fuad, A dan Yaacob M.Y. 2010:1)

Menurut Asidi Dipodjodjo (2008:59), debat merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan secara lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan gagasan atau pendapat. Dalam sebuah debat, setiap pihak berhak mengajukan pendapat dan memberikan alasan sehingga pihak lawan atau pihak yang

tidak setuju dapat menerima dan berpihak kepadanya.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Suknadinata (2009:530) metodologi kualitatif yang menekankan bahwa kenyataan itu berdemensi jamak, interaktif dan satu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seseorang dan perilaku dapat diamati. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan objek yang diteliti. Data yang terkumpul adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat gambaran dan akan dianalisa secara kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengukur efektivitas metode kampanye debat dalam meningkatkan partisipasi politik dengan ukuran efektivitas Bernard dalam Prawirosentono (2008:27)

1. Kejelasan tujuan program
2. Penyediaan sarana dan prasarana
3. Efektivitas sasaran program

Hasil Penelitian

Debat merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Di ajang inilah, setiap paslon mempromosikan visi-misinya. Selain sebagai sarana untuk menguji seberapa jauh pasangan calon menguasai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang akan dipimpinya, juga bisa dijadikan pasangan calon sebagai wahana untuk meyakinkan publik dan menaikkan tingkat kepercayaan publik. Ketetapan argumen, ketangkasan

menjawab soal dari pasangan calon lain, keakuratan data, konsistensi dalil, dan rasionalitas jawaban, semua dipergakan di forum debat dan publik yang akan menilai. Debat tidak semata pada tahapan prosedural tetapi mengandung makna substantif yakni komunikasi politik. Publik mendapatkan pesan dan pesan itu direspon dengan sebuah sikap politik. Debat juga mengandung pesan politik yang bisa menjadi referensi publik untuk memilih atau tidak memilih serta sebagai bentuk pengawasan publik bagi pasangan calon yang terpilih. Masyarakat juga dituntut daya kritis masyarakat dalam menilai setiap pemaparan visi dan misi masing-masing calon pada saat tahapan debat berlangsung agar menjadi pemilih yang rasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dalam proses pelaksanaan kampanye tahapan debat pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018, ada beberapa faktor yang membuat tahapan debat tidak efektif diantaranya;

Pertama, Kejelasan tujuan program. Tujuan pelaksanaan Debat Publik dalam pilkada memberi manfaat bagi masyarakat sebagai panduan dalam memilih siapa yang layak menjadi pemimpin, khususnya bagi para pemilih yang masing-masing mengambang atau belum menentukan pilihannya. Bagi pemilih yang sudah menetapkan pilihan, debat publik bisa saja menjadi tolak ukur dari para pemilih untuk semakin yakin dengan pilihan mereka atau sebaliknya akan mempengaruhi atau merubah pilihan para pemilih.

Debat publik diperlukan untuk melihat kualitas dari masing-masing pasangan calon dikarenakan dalam debat publik masing-masing pasangan calon akan memberikan gambaran

umum tentang visi-misi dan program kerja dari pasangan calon ketika terpilih nanti. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan debat publik pada pilkada Kabupaten Minahasa tahun 2018 tidak berjalan sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program debat publik.

Tujuan dilaksanakannya program debat publik tidak berjalan efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya akses lokasi pelaksanaan yang tidak strategis menyebabkan banyak masyarakat yang mempertimbangkan untuk mengikuti atau menyaksikan secara langsung pelaksanaan debat publik. Faktor lainnya adalah kuota pendukung yang dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa membatasi keterlibatan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung proses berjalannya debat publik yang seharusnya pesan-pesan dari debat publik merupakan panduan atau instrument bagi masyarakat untuk menilai masing-masing pasangan calon sehingga dapat memilih calon yang tepat untuk menjadi pemimpin di daerah. Penyiaran lewat media elektronik sangat tidak efektif dan tidak bisa menjadi penjamin untuk menjangkau semua masyarakat Minahasa yang adalah pemilih dikarenakan kurangnya masyarakat yang mengakses media penyiaran tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi dan informasi terkait pelaksanaan program debat publik ini juga yang membuat tujuan pelaksanaan program debat publik ini tidak jelas.

Dari semua faktor yang di atas menunjukkan ketidakjelasan tujuan dari program debat publik pada pilkada tahun 2018 yang pada dasarnya tujuan program debat publik tersebut adalah

pasangan calon akan saling beradu argumentasi terkait visi-misi dan juga program-program dari masing-masing pasangan calon sehingga masyarakat bisa menilai kualitas dari masing-masing pasangan calon.

Kedua, sarana prasarana. Pada tahapan debat pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa, Komisi pemilihan umum memilih Mercure Hotel yang bertempat di desa tateli kecamatan Mandolang. Ditinjau dari posisi dan letak desa tateli, letak tempat pelaksanaan tahapan debat ini tidak strategis dikarenakan desa tateli berada di perbatasan luar Kabupaten Minahasa yang bersebelahan dengan kota Manado. Jika diukur jarak tempuh dari ibukota Kabupaten yakni Tondano sangatlah jauh yaitu berkisar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan mobil.

Penempatan lokasi yang tidak strategis memungkinkan adanya pertimbangan dari setiap masyarakat untuk dapat mengikuti atau menyaksikan secara langsung proses tahapan debat ini. Dari beberapa informan menjelaskan bahwa tempat yang dipilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa untuk dijadikan tempat pelaksanaan tahapan debat sangatlah tidak tepat. bagaimana masyarakat atau pemilih akan turut berpartisipasi jika tempat pelaksanaan tahapan debat ini tidak strategis atau jauh dari ibukota Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum menerangkan bahwa dalam penentuan tempat pelaksanaan debat penyelenggara memperhatikan faktor keamanan sehingga penyelenggara mengambil kebijakan untuk pelaksanaan tahapan debat dilaksanakan di Mercure Hotel desa Tateli

Kecamatan Mandolang. Akan tetapi menurut peneliti, Seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa melaksanakan tahapan debat di ibukota Kabupaten yang dimana ibukota Kabupaten juga berada di tengah Kabupaten Minahasa. Selain letaknya berada di tengah Kabupaten, ibu kota Kabupaten merupakan tempat atau lokasi yang sangatlah strategis dimana pusat pemerintahan dan pelayanan publik Kabupaten Minahasa berada di ibukota Kabupaten. Terkait faktor keamanan, Komisi Pemilihan Umum bisa memaksimalkan pihak Kepolisian bahkan juga bisa melibatkan aparat Militer dalam rangka menjaga kondusifitas dan keamanan pelaksanaan tahapan debat ini. Penentuan tempat yang strategis dan tepat sangatlah penting.

Ketiga, Efektivitas sasaran program. Salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang paling atau sangat dinantikan masyarakat atau setiap pemilih adalah tahapan debat dimana masing-masing pasangan calon akan beradu visi-misi dan juga argumentasi terkait Kabupaten Minahasa. Antusias masyarakat untuk dapat terlibat atau menyaksikan tahapan debat ini sangatlah tinggi. Akan tetapi tingginya antusias dari masyarakat dibatasi oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang membatasi kuota pendukung pasangan calon.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa pada pelaksanaan tahapan debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa membatasi kuota pendukung dikarenakan kuota tempat yang terbatas dan juga anggaran yang ada sangatlah terbatas dan Komisi Pemilihan Umum harus menyesuaikan

dengan anggaran yang ada. Faktor inilah yang membatasi partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam menyaksikan dan mengikuti tahapan debat ini. Tujuan dilaksanakan debat adalah dimana masing-masing pasangan calon akan saling beradu argumentasi visi-misi, pandangan, serta gagasan-gagasan untuk memabangun Kabupaten Minahasa yang seharusnya disaksikan oleh setiap masyarakat atau pemilih. Dalam penelitian dan observasi awal yang dilakukan, didapati bahwa yang di undang dalam proses pelaksanaan tahapan debat adalah para pejabat pemerintahan dan juga tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan debat tersebut. Seharusnya masyarakat atau para pemilih yang sebenarnya diundang atau diberi kesempatan untuk menyaksikan proses tahapan debat berlangsung dikarenakan masyarakat atau pemilih tersebut yang akan menilai setiap pesan-pesan yang disampaikan masing-masing pasangan calon, apakah itu akan memperkuat pilihan mereka atau sebaliknya akan mempengaruhi pilihan mereka sebelum menyaksikan tahapan debat tersebut.

Pembatasan kuota dan juga ketidaktepatan sasaran pelaksanaan program dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa membuat keterlibatan atau partisipasi politik masyarakat pada tahapan debat sangatlah minim. Justru yang hadir adalah pejabat publik dan juga para tim sukses dari masing-masing pasangan calon. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan debat pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Minahasa ini sangat tidak efektif dalam meningkatkan partisipasi politik. Dari beberapa informan menjelaskan bahwa

banyak masyarakat yang ingin menyaksikan proses tahapan debat tersebut akan tetapi dibatasi oleh pihak penyelenggara sehingga sasaran program sangatlah tidak tepat.

Kurangnya informasi dan sosialisasi merupakan suatu faktor yang menjadikan pelaksanaan debat tidak efektif. Informasi dan sosialisasi merupakan instrument penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum terlebih khusus dalam tahapan debat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa kurangnya informasi dan sosialisasi yang di terima oleh masyarakat Minahasa terkait setiap tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sehingga masyarakat tidak mengetahui jadwal atau informasi-informasi terkait setiap tahapan yang ada. Faktor ini yang menyebabkan sasaran program dari tahapan debat ini yaitu semua pemilih di Kabupaten Minahasa tidak tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas metode kampanye debat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tujuan program tahapan debat yaitu tersampainya pesan-pesan politik dari masing-masing pasangan calon pada saat debat berlangsung sehingga bisa mempengaruhi sikap dari pemilih dan juga menjadi instrument bagi pemilih untuk menilai kualitas dari masing-masing pasangan calon tidak berjalan sesuai dengan tujuan.
2. Penyediaan Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan debat pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018

tidak memadai sehingga dilihat dari penempatan lokasi dari penyelenggaraan yang tidak strategis menyebabkan tahapan debat publik menjadi tidak efektif dan hanya sebatas tahapan procedural.

3. Sasaran program dalam tahapan debat pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018 tidak tepat. Masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran dari program tahapan debat ini tidak dapat mengikuti atau berpartisipasi diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tempat yang tidak strategis, pembatasan kuota pendukung oleh penyelenggara, saluran televisi yang tidak memadai dan juga informasi dan sosialisasi yang kurang dari pihak penyelenggara

Saran

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan mengenai Efektivitas metode kampanye debat pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Terdapat beberapa kekurangan, maka dari itu diperlukannya beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan program tahapan debat, pihak penyelenggara harus memperhatikan tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Seharusnya yang menjadi tujuan dari program tahapan debat adalah tersampainya pesan-pesan politik yang akan menjadi panduan bagi setiap pemilih untuk menentukan pilihan mereka.
2. Komisi Pemilihan Umum harusnya tidak membatasi kuota pendukung pada tahapan debat

sehingga tidak membatasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ruang terbuka seperti lapangan adalah tempat yang cukup besar dan terbuka dan tidak membatasi masyarakat untuk dapat menyaksikan secara langsung proses tahapan debat pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018. Dalam pelaksanaan tahapan debat harus memperhatikan sasaran dari program tahapan debat ini. Jika kuota pendukung dibatasi oleh anggaran yang ada, Pihak penyelenggaraan yakni Komisi Pemilihan Umum harus memaksimalkan media informasi dan media sosial resmi dalam menjangkau sasaran program tahapan debat ini yakni para pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L dan Yusliati Hj. 2018 .
efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika serta pengaruhnya terhadap kejahatan di Indonesia. Ponorogo: Uwais inspirasi Indonesia.
- Rahman, M. 2017. *Ilmu Administrasi*. Makasar : CV Sah Media
- Fuad, A dan Yaacob M.Y. 2010. *Seni debat panduan komprehensif*. Jakarta: PTS Profesional.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin kiyai. 2013. *Hubungan efektivitas pengelolaan program raskin dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna, vol.-(-) : 1-23
- Cangara, Hafied. 2011. *Pengantar ilmu komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Persada.
- Nimmo, D. 2011. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Jalaluddin Rakhmat (penyunting). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Dipodjodjo, A. 2008. *Komunikasi lisan*. Yogyakarta: PD. Lukman.
- Sukadi, G. 2011, *public speaking bagi pemula*. Jakarta: Grasindo.
- Dendy, S.2008, *kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa edisi keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Azlin, Nadia. (2012). *Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau (Studi Kasus Ruang Rawat Inap Kelas III)*.Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Sigit, Soehardi. 2009. *Esensi Perilaku Organisasi*. Penerbit Lukman Offset, Yogyakarta
- Suyadi Prawirosentono. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*?. Yogyakarta:BPFE.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly. 2013. *Organisasi, perilaku, struktur,proses*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Kamdhi, J. S. 2011. *Diskusi yang Efektif*. Kanisius. Yogyakarta
- Venus, Antar. (2004). *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekaatam Media.

Sumber lainnya :

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Minahasa
Minahasa.go.id

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan
Volume 3 No. 3 Tahun 2019
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia (PKPU) nomor 4
tahun 2017 *tentang kampanye
pemilihan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati
dan/atau walikota dan wakil wali kota*
Undang-undang No.10 Tahun 2016
*tentang pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota*

